

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ruslan, (2023). *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. Rajawali Pers. Depok
- _____. 2011. *Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Sarana Hukum Penyelenggaraan Negara*. Orasi Guru Besar.
- Adami Chazawi. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ade Saptomo. 2009. *Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Grasindo.
- Andi Hamzah. 1991. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , 2007. *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori. Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah. Aliran Dan Pemaknaan*. Yogyakarta: University of Gajah Mada.
- Arifin P. Soeria Atmadja. 1986. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: PT. Gramedia
- , 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Artidjo Alkostar. 2008. *Korupsi Politik di Negara Modern*. PH UII Press. Yogyakarta
- Baharudin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Bambang Waluyo. 2006. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Sumber Ilmu
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 2021. *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, cetakan pertama. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensir Di Indonesia*. Bandung: Armico.

Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hyronimus Rheti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

IGM Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.

Ilham Gunawan. 1990. *Postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis. Budaya dan Politik*. Bandung: Angkasa.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum. Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

J. S. Dalimunthe. 2020. *Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan*

Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga. Indonesia Sosial Sains 1

M. Agus Santoso. 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana.

Masruchin Ruba¹. 1994. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*. Malang:

Penerbit IKIP Malang

Muhammad Djafar Saidi. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali

Muladi dan Nawawi Arief, Barda. 1994. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- , 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Munawar Fuad Noeh. 1997. *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta : Zikrul Hakim.
- Nashriana. *Aset recovery dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian keuangan negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwaning M. Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Cet-1. Bandung: PT. Alumni
- Rajagukguk. E. 2006. Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian keuangan negara. Makalah disampaikan pada Diskusi Publik "Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi". Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Reda Manthovani, R. Narendra Jatna. 2012. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. CV. Jakarta: Malibu
- Roeslan Saleh. 1998. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rusli Effendy, Achmad Ali. dkk. 1991. *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press
- Sactohid Kartanegara. Tanpa Tahun. *Hukum Pidana Bagian II Delik-delik Tertentu*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- , 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Theodorus M. Tuanakotta. 2018. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Edisi 2, Salemba Empat, hlm.
- Tri Andrisman. 2009. *Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- W. Riawan Tjandra. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika

Yunus Husein. *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana (Asset Recovery) dan Corporate Criminal Liability*. Jakarta: Bahan Presentasi di STHI Jentera

Zaenudin. 2018. *Perampasan Harta Benda Milik Terpidana yang Bukan Diperoleh dari Hasil Tindak Pidana Korupsi untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara*. Disertasi. Malang: Universitas Brawijaya.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Tesis dan Disertasi

Arjun. A. 2022. *Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Luwu Utara)*. Doctoral Dissertation. Institut Agama Islam Negeri Palopo)

Derliana Sari. 2008. *Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian keuangan negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Tesis. Fakultas Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia

Slamet Siswanta. 2017. *Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip

Melkias Hetharia. 1996. *Fungsi Hukum Menurut Roscoe Pound*. Tesis. Universitas Indonesia. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya.

Muhammad Rafi Urrutab. 2023. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Perspektif Due Process of Law*. Tesis. Yogyakarta: Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Murwiyanto. 2015. *Efektivitas Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengembalian Kerugian keuangan negara Akibat Korupsi*. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

C. Artikel Jurnal

Abd. Razak Musahib. Depok. *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*. E-jurnal Katalogis. Volume 3 Nomor 1.

Ade Mahmud. September 2018. *Penerapan Delik Formil Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya Terhadap*. AKTUALITA. Voume 1 Nomor 2

Baharuddin Badaru, et.al, 2020, *Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian keuangan negara Akibat Tindak Pidana*

Korupsi, Journal of Lex Theory (JLT) 1, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/263/264>

Candra, D., dan Arfin. 2018. *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional*. Jurnal BPPK, 11(1)

Damanhuri Fattah. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589>
Diakses tanggal 12 September 2023

Eddy O.S. Hiariej. *Pengembalian Aset Kejahatan*. Jurnal Opinio Juris Volume 13 Mei- Agustus 2013

Guntur Rambey. Januari – Juni 2016. *Pengembalian Kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*. De Lega Lata. Volume I. Nomor 1

Hambali. A. R. 2021. *Kemerdekaan Hakim dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Konsep Negara Hukum*. Kalabbirang Law Journal. Volume 3, Nomor 1

Herianto, dkk, 2023. *Penyitaan Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir*. Locus Journal of Academic Literature Review. Volume 2 Issue 6.

Juandra. Mohd Din. dkk. 2021. *Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ius Constituendum. Volume 6 Nomor 2 Oktober 2021

Marfuatul Latifah, Juni 2015, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum Volume 6, Nomor 1.

Nainggolan, Josua. Upaya Penegakan Hukum terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian keuangan negara. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol. 15, No. 1, 2021, doi:10.31479/jphl.v15i1.204.

Refki Saputra. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Jurnal Integritas. Volume 3. Nomor 1. Maret 2017

Rixy Fredo S. 2015. *Suatu Kajian Tentang Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999)*. Lex Crimen. Volume IV Nomor 5

Syaifulloh. A. 2019. *Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Indonesian Journal of Criminal Law. 1(1).

Ulang Mangun Sosiawan. 2020. *Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*. Volume 20. Nomor 4.

Nilma Lubis, dkk, 2021. *Upaya Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan dan Penyitaan Terhadap Harta Hasil Kejahatan Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol. 3 No. 2

Teddy Lazuardi Syahputra, dkk. 2019. *Tanggung Jawab Kejaksaan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. USU Law Journal. Volume 7. Nomor 2

D. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*. UU No. 17 Tahun 2003. LN No. 47 Tahun 2003. TLN No. 4286.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2020. *Panduan Per masyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta

Indonesia, *Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

E. Sumber-sumber Interne

Assiddiqie, Jimly. 2009. *Penegakan Hukum*. (Makalah), Jakarta: http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. diakses tanggal 15 Februari 2022.

----- . *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.
www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

Babel. *Mekanisme Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara oleh Bendahara*. <https://babel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/03/MEKANISME-PENYELESAIAN-KERUGIAN-NEGARA-OLEH-BENDAHAARA.pdf>.

Dwika. *Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*.
[\(http://hukum.kompasiana.com\)](http://hukum.kompasiana.com).(02/04/2011). diakses pada 5 Januari 2022

GoodStats. 2024. *Seberapa Tinggi Kasus Korupsi di Indonesia?*.
<https://goodstats.id/article/tingkat-korupsi-di-indonesia-menurut-transparency-international-6rRou>. diakses tanggal 10 April 2024

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40161>. diakses tanggal 22 Mei 2022

<https://star.worldbank.org/sites/default/files/g20-asset-recovery-guide-2013-saudi-arabia.pdf>. diakses tanggal 10 Mei 2023

<https://www.unodc.org/corruption/en/learn/what-is-uncac/asset-recovery.html>. diakses tanggal 22 Mei 2022

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5920&bid=8156> . diakses tanggal 20 Maret 2024

Kompas.com. 25 September 2019. *Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Berisiko Melemahkan KPK*.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk?page=all>.
diakses tanggal 04 Juni 2022

Kompas.com. *Data ICW 2020: Kerugian keuangan negara Rp 56.7 Triliun. Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8.9 Triliun*.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>. diakses tanggal 09 Februari 2022

Pusat Edukasi Anti Korupsi. 2022. *Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya!*.
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>. diakses tanggal 12 Mei 2023

Pusat Edukasi Anti Korupsi. 2023. *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*.
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>. diakses tanggal 20 Maret 2024

Pusat Edukasi Anti Korupsi. 23 Mei 2022. *Apakah Hukuman Koruptor Setimpal dengan Kerugian keuangan negara?*.
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220523-apakah>

[hukuman-koruptor-setimpal-dengan-kerugian-negara.](#)
tanggal 10 Desember 2023

diakses